



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020

# Tanah Airku

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)  
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL  
TEMA 15



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020

# Tanah Airku

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)  
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL  
TEMA 15

- **Penulis:** Onny Budi Antika, S.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto  
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 60 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020  
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Petunjuk Penggunaan Modul .....	1
Tujuan Setelah Mempelajari Modul .....	2
Pengantar Modul .....	2
<b>UNIT 1 KISAH POLITIK INDONESIA .....</b>	<b>3</b>
1. Perkembangan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan .....	3
2. Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin .....	7
3. Perkembangan Politik Pada Masa Orde Baru .....	15
4. Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi hingga Sekarang .....	17
<b>PENUGASAN 1 .....</b>	<b>22</b>
<b>LATIHAN UNIT 1 .....</b>	<b>23</b>
<b>UNIT 2 CERITA RUPIAH INDONESIA .....</b>	<b>25</b>
1. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Awal Kemerdekaan .....	25
2. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin .....	27
3. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru .....	31
4. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Reformasi hingga Sekarang .....	33
<b>PENUGASAN 2 .....</b>	<b>35</b>
<b>LATIHAN UNIT 2 .....</b>	<b>36</b>
<b>UNIT 3 SEMAKIN BERPENDIDIKAN DAN BERBUDAYA .....</b>	<b>39</b>
1. Dinamika Pendidikan di Indonesia .....	39
2. Dinamika Kebudayaan di Indonesia .....	43
<b>PENUGASAN 3.1 .....</b>	<b>47</b>
<b>PENUGASAN 3.2 .....</b>	<b>47</b>
<b>LATIHAN UNIT 3 .....</b>	<b>48</b>
Rangkuman .....	50
Kunci Jawaban, Pembahasan dan Rubrik Penilaian .....	52
Kriteria Pindah Modul .....	57
Saran Referensi .....	58
Daftar Pustaka .....	58
Profil Penulis .....	59



# TANAH AIRKU

## Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang disusun secara berurutan mulai dari unit 1 sampai dengan unit 3. Pembahasan setiap unit merupakan satu kesatuan. Untuk dapat memahami modul secara baik, Anda perlu mengikuti petunjuk berikut dalam membaca modul.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.
2. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
3. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
5. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir unit.
6. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian latihan soal memiliki rata-rata skor minimal 75.
7. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
8. Selamat membaca dan mempelajari modul.

## Tujuan Setelah Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan dapat :

1. Menganalisis dinamika politik yang terjadi pada masa era reformasi dan mengidentifikasi manfaat dari perubahan politik tersebut pada kehidupan kita sekarang.
2. Mengetahui dinamika ekonomi di Indonesia dan dapat menganalisis perekonomian keluarga serta dapat merancang masa depan dengan tingkat ekonomi keluarga serta dapat mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi pada masa datang dari sejarah dinamika ekonomi di Indonesia
3. Menentukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Anda serta dapat menganalisis tingkat pendidikan dari suatu wilayah terhadap eksistensi dari suatu budaya di wilayah tersebut.

## Pengantar Modul

Modul “Tanah Airku” menyajikan materi-materi yang membahas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan negara telah membawa perkembangan pesat pada berbagai bidang kehidupan di Indonesia, termasuk bidang politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Mengapa upaya tersebut harus dilakukan? Tidak lain adalah untuk memajukan komponen bangsa terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi. Karena perkembangan dan perubahan akan selalu ada dengan tujuan agar tercipta tatanan yang lebih baik demi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Agar lebih memahami mengenai sejarah perkembangan Indonesia, Anda perlu mempelajari modul “Tanah Airku” agar mempunyai pemahaman secara utuh tentang sejarah perkembangan politik, ekonomi, Pendidikan dan budaya di Indonesia. Modul “Tanah Airku” akan terbagi dalam tiga unit, yaitu:

1. Kisah Politik Indonesia.
2. Cerita Rupiah Indonesia.
3. Semakin Berpendidikan dan Berbudaya.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal dan penugasan untuk menguji pemahaman dan penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari.

## UNIT 1 KISAH POLITIK INDONESIA

Apakah Anda merasakan dan mengetahui dinamika politik yang ada di Indonesia? Bagaimana menurut Anda perkembangan politik pada awal kemerdekaan sampai reformasi? Untuk lebih mengerti dan memahami dinamika politik yang ada di negara kita mari pelajari modul unit dua ini dengan sungguh-sungguh.

Sejak masa Kemerdekaan hingga awal Reformasi tahun 1998, keadaan politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia.

### 1. Perkembangan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945 -1950)

Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masa itu. Berkaitan dengan hal itu, maka ada beberapa kejadian yang perlu Anda ketahui.

#### a. Pembentukan Struktur Pemerintahan

Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara kita belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Pengesahan UUD 1945

UUD 1945 ditetapkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada rapat tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.

##### 2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia.

3) Pembagian Wilayah Indonesia

Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi diseluruh bekas jajahan Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Sumatera, dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.

4) Pembentukan Kementerian

Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini diputuskan pembentukan kementerian-kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a) Departemen Dalam Negeri | g) Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan |
| b) Departemen Luar Negeri  | h) Departemen Sosial                                 |
| c) Departemen Kehakiman    | i) Departemen Pertahanan                             |
| d) Departemen Keuangan     | j) Departemen Penerangan                             |
| e) Departemen Kemakmuran   | k) Departemen Perhubungan                            |
| f) Departemen Kesehatan    | l) Departemen Pekerjaan Umum                         |

5) Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

6) Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

b. Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan

dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pada 23 Agustus – 2 November 1949, konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag Belanda. Pihak – pihak Yang Menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) diantaranya :

- » Delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Mohammad Hatta.
- » Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang akan mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia, diketuai oleh Sultan Hamidi II
- » Delegasi Belanda diketuai oleh J.H. van Maarseveen.

Dalam konferensi ini Belanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda.



Sumber: <https://newswantara.com/>

Gambar 1.1 Konferensi Meja Bundar

Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak Negatif, republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan harus berubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesiahanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.

- 1) Negara Bagian  
Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.
- 2) Satuan-Satuan Kenegaraan  
Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah.
- 3) Daerah Swapraja  
Daerah Swapraja meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD (Undang-Undang Dasar). Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.



Sumber : Wikipedia.org

Gambar 1.2 Pembagian Wilayah RIS dan RI

- c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan  
Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan sejak Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Tidak sampai satu tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950.

Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (Undang Undang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keadaan politik di Indonesia mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

- a. Keadaan Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem Demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur satu tahun. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951)
- 2) Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952)
- 3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)

- 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955)
- 5) Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
- 6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957)
- 7) Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)



Sumber : <http://indonesiakumembangkakan.blogspot.com/>

Gambar 1.3 Kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal

Meskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa Demokrasi liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada tahun 1955. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 29 September 1955 Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI
- 2) Tanggal 15 Desember 1955 Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956.



Sumber : Wikipedia.org

Gambar 1.4 Pemilu Legislatif 1955

b. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.

Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirilah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet Presidensial.



Sumber: <http://auliaadhelina.blogspot.com>

Gambar 1.5 Demokrasi Terpimpin

Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi Terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.
- 2) Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.
- 3) Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.

- 4) Penetapan Manifesto politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
- 5) Pengangkatan presiden seumur hidup.
- 6) Penyimpangan Politik Luar Negeri bebas aktif. Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan Tiongkok), Poros Jakarta–Phnom penh – Hanoi – Peking – Pyongyang (Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Tiongkok, dan Korea Utara). Hal ini berarti Indonesia lebih memilih blok sosialis/komunis. Padahal Indonesia merupakan salah satu anggota gerakan non Blok. Dengan demikian politik luar negeri Indonesia menjadi tidak bebas dan aktif lagi.

Pemilihan Umum I 1955 belum dapat membawa perubahan menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, misalnya belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi terutama di daerah-daerah. Pergolakan di daerah ini diawali dengan adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein di daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 20 Desember 1956. Adapun secara singkat terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakan sosial politik pasca pengakuan kedaulatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat

Pada tanggal 7 Agustus 1949, Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) dengan kekuatan pendukung Tentara Islam Indonesia (TII). DI/TII menyatakan diri lepas dari pemerintah Republik Indonesia.

Aksi yang dilakukan oleh DI/TII Jawa Barat di antaranya pada waktu pasukan Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dalam peristiwa “Long March Divisi Siliwangi” mencoba dihalangi dan berusaha untuk menarik anggota-anggota TNI ke pihak pemberontak. Kontak senjata antara TNI Divisi Siliwangi dengan DI/TII tidak dapat dihindarkan. Pertempuran pertama terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 di desa Antralina, Malangbong. Pemerintah cepat tanggap dan segera bertindak menumpas pemberontakan DI/TII. Pada tahun 1960 Kodam VI Siliwangi ditugaskan untuk menumpas gerombolan DI/ TII bersama dengan rakyat. Kodam VI Siliwangi menjalankan operasi “Pagar Betis” dan “Bratayudha”. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan pengikutnya dapat ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Oleh Mahkamah Angkatan Darat, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.

## 2) Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung Kapten Raymond Westerling memimpin gerombolan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai "Tentara Pasundan" dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara boneka tersebut. Gerombolan APRA yang menyerang kota Bandung tersebut berjumlah kurang lebih 800 orang dan terdiri dari bekas KNIL. Dalam serangannya ke kota Bandung, tantara APRA juga melakukan perampokan-perampokan.



Sumber: *historia.id*

Gambar 1.6 Pengincaran APRA

Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

## 3) Pemberontakan Andi Azis

Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Adapun berbagai tuntutan Andi Azis terhadap pemerintah RIS sebagai berikut.

- Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT.
- Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa Tengah di bawah pimpinan Mayor Worang.

- Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan supaya tetap berdiri.



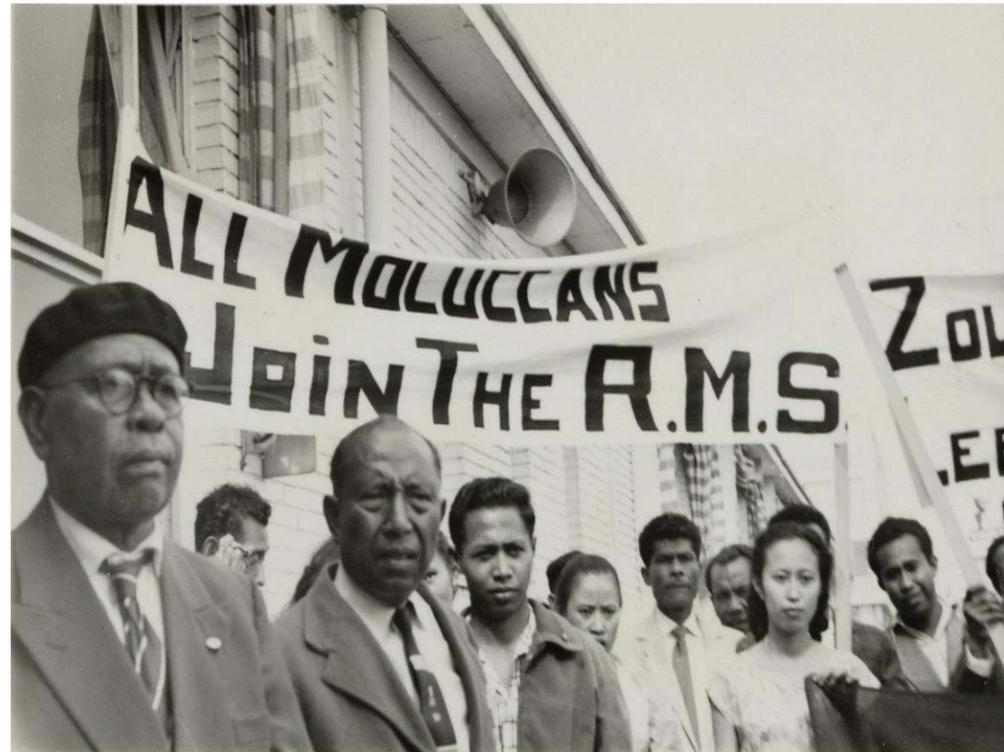
Sumber : *tirto.id*

Gambar 1.7 Pasukan Pemberontakan Andi Azis

Untuk menumpas pemberontakan Andi Azis pemerintah RIS melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah:

- Setelah ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut.
  - Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Pada bulan April 1950 Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950.
- ## 4) Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
- Pemberontakan ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang pro Belanda. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.

Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. Leimena. Akan tetapi upaya ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Pada tanggal 25 September 1950 seluruh Ambon dan sekitarnya dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Dalam pertempuran melawan pemberontak RMS ini gugurlah seorang pahlawan Ketika memperebutkan benteng Nieuw Victoria, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang gugur adalah Letnan Kolonel S. Sudiarso dan Mayor Abdullah.



Sumber : [sisapeninggalansejarah.blogspot.com](http://sisapeninggalansejarah.blogspot.com)

Gambar 1.8 Pemberontakan RMS

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun, sejak gagalnya G30S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat karena bertentangan dengan rasa keadilan.



Letjen. A. Yani      Mayjen. R. Soeprapto      Mayjen. Harjono      Brigjen Soetojo



Brigjen D. I. Pandjaitan      Mayjen. S. Parman      Lettu. P. A. Tendean

Sumber : [kompasiana.com](http://kompasiana.com)

Gambar 1.9 Pahlawan Revolusi korban kekejaman PKI

Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok dan memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

### 3. Perkembangan Politik Pada Masa Orde baru (1966-1998)

Pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah yang disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut.

- a. 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
- b. 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI
- c. 3. Turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam rentang waktu tersebut, politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan.

a. Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI

Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlandung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia.



Sumber: <https://newswantara.com>

Gambar 1.10 Rakyat Indonesia Menuntut Pembubaran PKI

Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu, ia memperbaharui kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan Lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30-S.

b. Pemilihan Umum

Selama masa orde baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde baru.

c. Peran Ganda (Dwifungsi) ABRI

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran Peran ganda pada ABRI, yaitu peran pertahanan dan keamanan (Hankam) dan peran dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan Dwifungsi ABRI. Dengan peran ganda ini ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan orde baru Dwifungsi ABRI mulai dihapuskan.

d. Integrasi Timor Timur Ke Wilayah Republik Indonesia

Keinginan rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia dituangkan dalam petisi Rakyat Timor Timur yang disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia. Petisi ini ditandatangani oleh gubernur PSTT dan ketua DPR Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976. Isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum. Pada tanggal 7 Juni 1976 Petisi Rakyat Timor Timur itu diterima oleh Presiden Suharto di Jakarta.

Perhatian mengenai korupsi dan nepotisme, memusat di sekitar pemerintahan Suharto, yang berlangsung sejak 1990 akhirnya nasibnya berakhir setelah krisis ekonomi tahun 1997. Pada bulan Mei 1998 demonstrasi mahasiswa meningkat di kota-kota besar, dan harga-harga yang terus meningkat menyebabkan frustrasi dan kemarahan massa. Keadaan itulah yang menjadi penyebab berakhirnya masa Orde Baru.

4. Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang)

a. Suharto Mengundurkan Diri dari Jabatan Presiden

Enam mahasiswa terbunuh selama demonstrasi di Universitas Trisakti, Jakarta pada 12 Mei 1998. Pada hari itu juga terjadi kerusuhan dan penjarahan, lebih dari 500 orang tewas dalam kekacauan tersebut. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan Surakarta tanggal 14-15 Mei 1998 merupakan kerusuhan terburuk di Indonesia sejak tahun 1965. Kerusuhan itu juga merusakkan harapan untuk segera memulihkan ekonomi. Di Surakarta sedikitnya 28 orang tewas. Suharto memutuskan untuk meninggalkan pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo dan kembali ke Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei Suharto muncul di TV dan menyatakan ia tidak akan turun, tetapi akan mengadakan pemilu baru. Beberapa tokoh Islam seperti Nurcholish Majid dan Abdurrahman Wahid bertemu Suharto pada saat ribuan mahasiswa

bedemonstrasi turun ke jalan. Pada tanggal 20 Mei 1998 Amien Rais menunda demonstrasi raksasa setelah 80.000 massa menduduki Lapangan Merdeka. Akhirnya, Suharto mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 pagi dan B.J. Habibie ditunjuk sebagai presiden baru Indonesia.



Sumber: Wikipedia.com

Gambar 1.11 Pidato Pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI

b. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pada tanggal 22 Mei 1998, Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi. Sebagai Langkah pertama, ia mengganti Letjen Prabowo dari Panglima Kostrad. Tetapi mahasiswa tidak senang dengan adanya presiden baru yang mereka lihat juga merupakan perpanjangan rezim Suharto. Kabinet Reformasi diresmikan pada tanggal 23 Mei 1998, dan Habibie berjanji akan menggelar pemilu satu tahun kemudian.



Sumber: portal-ilmu.com

Gambar 1.12 Pelantikan B.J. Habibie Sebagai Presiden Ke-3 RI

Pada tanggal 12 November 1998, terjadi lagi demonstrasi di Jakarta yang mengakibatkan 60 orang luka-luka. Pada hari berikutnya, 9 mahasiswa tewas di dekat Universitas Atma Jaya Jakarta. Akhirnya, MPR memutuskan, pemilu akan digelar pada bulan Juni 1999, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dibentuk.

Akhirnya pada tanggal 7 Juni 1999, pemilu digelar yang diikuti 48 partai besar dan kecil. Jumlah kursi di MPR diumumkan pada tanggal 1 September 1999. Dari 48 partai hanya 21 partai yang bisa mendapatkan kursi di MPR, dan hanya 6 partai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilu tahun 2004 yaitu PDI-P (153 kursi) Golkar (120 kursi) PPP (58 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (51 kursi), Partai Amanat Nasional (34 kursi), dan Partai Bulan Bintang, (13 kursi).

c. Pasca Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Pemerintah pada masa Reformasi telah berupaya melaksanakan berbagai pembenahan-pembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Reformasi dibidang ideologi negara dan konstitusi.
- 2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jujur.
  - b) Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.
  - c) Memberdayakan MPR.
  - d) Perlu pemisahan jabatan ketua MPR DPR.
- 3) Reformasi Lembaga kepresidenan dan cabinet meliputi hal-hal berikut.
  - a) Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.
  - b) Membatasi penggunaan hak prerogatif.
  - c) Menyusun kode etik kepresidenan.
- 4) Pembaharuan kehidupan politik, yaitu memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.
- 5) Penyelenggaraan pemilu.

- 6) Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan professional yang tidak memihak.
- 7) Militer dan dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pada era Reformasi posisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yaitu angkatan darat, laut, dan udara.
- 8) Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.



Sumber: Wikipedia.com  
Gambar 1.13 Surat Suara Pemilu 2004

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.



Sumber: wikipedia

Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pilpres 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019, diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jokowi-Amin dengan nomor urut 01 dan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pemilihan umum pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Dan Pemilihan Umum ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%.



Sumber: wikipedia  
Gambar 1.15 Surat Suara Pemilu 2014 dan 2019

## PENUGASAN 1

Anda diminta untuk mencari artikel di koran, majalah atau media cetak lainnya mengenai dinamika perubahan politik pada masa reformasi. Kemudian anda analisis manfaat apa yang diperoleh dari dinamika politik tersebut.

### Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan anda akan:

1. Mengetahui dinamika politik pada masa Reformasi
2. Mengetahui manfaat dinamika politik pada masa Reformasi

### Media

Koran, Majalah, Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

### Langkah-langkah

1. Carilah artikel di koran, majalah, atau media lainnya.
2. Tempelkan artikel yang sudah anda temukan di kertas folio dan tulislah manfaat dari artikel tersebut.

#### Tugas 2.1

#### Artikel Dinamika Politik Pada Masa Reformasi

Artikel	Manfaat
	
<p>Sumber : Harian Kompas, Jum'at 29 Juni 2018</p>	



## Latihan Unit 1

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar!

1. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap, hal itu disebabkan karena ...
  - a. tidak ada wilayah
  - b. tidak ada kepala pemerintah
  - c. menunggu persetujuan jepang
  - d. terjadi beda pendapat antara golongan muda dan tua
2. Hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah ...
  - a. piagam Jakarta
  - b. pemilihan presiden
  - c. pengesahan UUD 1945
  - d. pembagian wilayah
3. Menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah tugas ...
  - a. presiden
  - b. wakil Presiden
  - c. departemen dalam negeri
  - d. KNIP
4. Partai-partai pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk
  - a. Mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan partainya
  - b. Meningkatkan kerja sama antarpartai politik
  - c. Secara bersama-sama mendukung program pemerintah
  - d. Mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa
5. Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih ....
  - a. presiden dan wakil presiden
  - b. anggota DPR
  - c. anggota Dewan Konstituante
  - d. anggota Kabinet
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo I merupakan salah satu kabinet yang berhasil memegang pemerintahan masa Demokrasi Liberal. Prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah....

- a. dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif
  - b. berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika
  - c. berhasil ditumpasnya gerakan separatis
  - d. berhasil menghancurkan masalah SARA
7. Tiga partai besar mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah ....
- a. PNI, Masyumi, dan NU
  - b. PNI, Parkondo, dan Masyumi
  - c. NU, Muhammadiyah, dan PKI
  - d. Masyumi, Gerindo, dan PKI
8. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa Demokarasi terpimpin adalah ...
- a. pemilihan presiden dan wakil presiden
  - b. pembentukan kementrian
  - c. membentuk pertahanan dan keamanan
  - d. pengangkatan presiden seumur hidup
9. Tujuan dari penyederhanaan partai-partai politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde baru adalah ...
- a. terlalu banyak partai
  - b. menciptakan stabilitas kehidupan bangsa
  - c. pembentukan pemerintahan
  - d. tidak adanya pemilihan umum
10. Peran ganda ABRI pada masa Orde baru lebih dikenal dengan ...
- a. dwifungsi ABRI
  - b. dua tugas ABRI
  - c. tugas pokok ABRI
  - d. tugas fungsi ABRI

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apa tujuan pelaksanaan gerakan reformasi?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilihan umum secara langsung!
3. Menurut anda bagaimana perkembangan politik pada masa Reformasi? Jelaskan pendapat Anda!
4. Bagaimana pengaruh IPTEK (media social) terhadap kondisi politik saat ini? jelaskan pendapat Anda!
5. Jelaskan bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan sekitar Anda ketika akan ada pemilihan kepala daerah!

## UNIT 2

## CERITA RUPIAH INDONESIA

Sampai saat ini apa yang Anda rasakan berkaitan dengan perkembangan ekonomi Indonesia? Pasti Anda banyak mengalami perubahan-perubahan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kita. Seperti contoh perubahan nilai tukar rupiah yang mengalami perubahan setiap harinya yang berdampak kepada harga barang-barang. Kebijakan pemerintah mengenai perekonomian juga akan berdampak kepada kita, misalkan kebijakan pengurangan subsidi BBM, listrik, pangan, dll.

Sejak proklamasi kemerdekaan, perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, sampai masa reformasi. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai upaya telah dilakukan hingga perekonomian Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Agar Anda dapat mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi, pelajailah uraian berikut ini.

### 1. Perkembangan Ekonomi Pada Awal Kemerdekaan

Pada akhir pemerintahan pendudukan Jepang dan awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang hebat menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa hari. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, sehingga ekonomi kita bertambah sulit. Pemerintah Republik tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki uang untuk penggantinya. Kas pemerintah kosong. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Pada masa itu ditetapkan tiga mata uang yaitu:

- a. Mata uang De Javasche Bank
- b. Mata uang pemerintah Hindia Belanda
- c. Mata uang pemerintah pendudukan Jepang



Sumber : newswantara.com

Gambar 2.1 Mata Uang yang berlaku pada masa penjajahan

Berikut merupakan permasalahan yang terjadi pada masa pasca proklamasi:

a. Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.

1) Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun.

Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan (menabung) sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pada tahun pertama sudah terkumpul

uang sebanyak 500 juta rupiah. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan.

2) Melakukan Diplomasi ke India

Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatik dalam rangka solidaritas negara-negara Asia.

3) Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Cooperation (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

2. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), defisit keuangan serta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat.

Tanggung beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB membuat defisit keuangan bertambah hingga mencapai 5,1 miliar rupiah. Defisit tersebut dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian, Indonesia mendapat kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Indonesia juga mendapatkan kredit

dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar AS yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana ekonomi seperti proyek-proyek pengangkutan otomotif, pembangunan jalan telekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara.

Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan tercapai. Namun pada kenyataannya, bantuan kredit ini tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber defisit.

Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 untuk menanggulangi defisit anggaran. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.



Sumber : intisari.grid.id

Gambar 2.2 Ilustrasi gunting Syafr

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

- 1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- 2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
- 3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut.

- 1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- 2) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
- 3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
- 4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- 5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- 6) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi De Javasche Bank



Sumber : reresepan.com

Gambar 2.3 Gedung De Javasche Bank di Surabaya

Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan

d. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan para pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

e. Devaluasi Mata Uang Rupiah

Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000.

Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.

f. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinnya daripada unsur ekonomi efisien. Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan.

Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan pemerintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat.



Sumber : [berdikarionline.com](http://berdikarionline.com)

Gambar 2.4 Presiden Soekarno berpidato

3. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat.

Untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu, kamu dapat membaca uraian berikut.

a. Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap sarana prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

b. Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

1) Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)

Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.

2) Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.

3) Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

4) Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.

5) Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)

Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

6) Pelita VI

Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.

4. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Reformasi

Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp. 2.500 pada tahun 1997 menjadi Rp.15.000 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi.

Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi.

a. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998 – 1999)

Pada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

- 1) Menjalin kerja sama dengan International Monetary Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
- 2) Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian.
- 3) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
- 4) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp.10.000.
- 5) Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999 – 2001)

Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali

merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp.12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.

- c. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (2001 – 2004)  
 Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.
- 1) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 miliar.
  - 2) Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  - 3) Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)  
 Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada Masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.
- 1) Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak  
 Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN.
  - 2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai  
 Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
  - 3) Pengurangan Utang Luar Negeri  
 Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika.
- e. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014 – sekarang)  
 Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

struktur APBN dirombak guna mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Pembangunan jalan tol dan tol laut yang memudahkan sarana transportasi baik darat maupun laut sangat memberi dampak terhadap perekonomian di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memahami apa yang anda pelajari dalam modul diatas, maka kerjakanlah penugasan berikut.

## PENUGASAN 2

1. Menganalisis tingkat ekonomi keluarga
2. Merancang masa depan berdasarkan tingkat ekonomi keluarga

### Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan anda akan :

1. Mengetahui tingkat ekonomi keluarga
2. Mengetahui rencana masa depan keluarga

### Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

### Langkah-langkah

Untuk penugasan 2 ikutilah langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tulislah pendapatan dan pengeluaran selama satu bulan terakhir pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Catatan Pendapatan dan Pengeluaran**  
**Bulan ...**

Tanggal	Keterangan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1 Juli 2018	Misal Uang saku bulanan dari orang tua (yang belum bekerja) Gaji Bulanan (Bagi yang sudah bekerja)	Misal  2.500.000	
2 Juli 2018	Beli pulsa		100.000
Dst			
	Total		

2. Tulislah rencana masa depan berdasarkan tingkat ekonomi keluarga.

**Tabel 1.2**  
**Catatan Rencana Masa Depan**

Tanggal	Keterangan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1 Juli 2019	Misal Uang saku bulanan dari orang tua (yang belum bekerja) Gaji Bulanan (Bagi yang sudah bekerja)	Misal  2.500.000x12 = 30.000.000	
2 Juli 2019	Biaya hidup selama 1 bulan		1.000.000
	Biaya Melanjutkan sekolah		500.000
Dst			
	Total		



## Latihan Unit 2

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar !

- Pada awal berdirinya RI, keadaan ekonomi sangat berantakan, negara mengalami inflasi yang cukup berat. Salah satu sumber inflasi adalah ...
  - belum naiknya pengaturan keuangan pada saat itu
  - beredar mata uang Jepang yang tidak terkendali
  - naiknya nilai dolar yang terus menerus
  - banyak produk pertanian Indonesia yang tidak laku di pasaran dunia
- Pemerintah melalui menteri keuangan pada saat itu yaitu Ir Surachman mengatasi keuangan negara yang memburuk dengan melaksanakan ...
  - kerja sama ekonomi dan perdagangan antara RI dengan Inggris
  - pinjaman nasional
  - kerja sama ekonomi antara RI dengan Belanda
  - menggalakkan perdagangan ekspor
- Tujuan dari Blokade laut yang dilakukan Belanda adalah ...
  - menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia
  - mempermudah keluar-masuk perdagangan Indonesia
  - memperlambat barang dagang Indonesia
  - memperoleh barang-barang impor dengan mudah

- Di bawah ini negara yang membantu Indonesia menembus blokade ekonomi Belanda melalui jalur politik adalah...
  - Amerika Serikat
  - Singapura
  - Malaysia
  - India
- Pada masa awal pemulihan kondisi ekonomi setelah kemerdekaan, pemerintah RI untuk sementara waktu mengakui mata uang yang berlaku, yaitu...
  - uang Hindia Belanda, uang pemerintah penjajah Jepang, dan ORI
  - uang pemerintah Hindia Belanda, uang NICA, dan ORI
  - uang NICA, uang pemerintahan penjajah Jepang, dan ORI
  - uang pemerintahan Hindia Belanda, uang pemerintahan pendudukan Jepang, dan uang De Javasche Bank
- Dalam upaya menyelamatkan perekonomian negara pemerintah pada masa Orde baru menetapkan kebijakan ...
  - jangka pendek dan jangka Panjang
  - jangka pendek dan jangka menengah
  - jangka menengah dan jangka Panjang
  - jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
- Program jangka Panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde baru diwujudkan dengan pelaksanaan selama ...
  - 10 tahun
  - 15 tahun
  - 20 tahun
  - 25 tahun
- Pelita I (pembangunan lima tahunan) dimulai pada tanggal ...
  - 1 April 1969
  - 1 Mei 1969
  - 1 Juni 1969
  - 1 Juli 1969
- Kebijakan privatisasi BUMN dilakukan pada masa pemerintahan ...
  - Presiden B.J. Habibie
  - Presiden Gusdur
  - Presiden megawati Soekarno Putri
  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
- Salah satu program yang terkenal untuk membantu masyarakat miskin pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah ...
  - bantuan Langsung Tunai
  - bantuan Orang Miskin
  - bantuan Tidak Mampu
  - bantuan Ekonomi Langsung

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !

1. Jelaskan dampak blockade laut yang dilakukan Belanda bagi bangsa Indonesia!
2. Sebutkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi blockade laut!
3. Jelaskan cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengubah struktur ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional!
4. Menurut anda bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini?
5. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam keluarga apa yang harus anda lakukan?

## UNIT 3

# SEMAKIN BERPENDIDIKAN DAN BERBUDAYA

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik karena pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah.

### 1. Dinamika Pendidikan Di Indonesia

#### a. Perkembangan Pendidikan Pada Awal Kemerdekaan

Pada zaman penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi Kemerdekaan pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafei. Kemudian ia digantikan oleh Mr. Suwandi.



Ki Hajar Dewantoro

TSG. Mulia

Mohammad Syafei

Mr. Suwandi

Sumber : Google.com

Gambar 3.1 Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada awal kemerdekaan

Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.

Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.



Sumber : [republika.co.id](http://republika.co.id)  
Gambar 3.2 Kampus UGM

b. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut menteri pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.

Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan akademi Pelayaran, akademi Oseanografi, dan akademi Reseach Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

Pada masa Demokrasi liberal, didirikan beberapa universitas baru di antaranya Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatera Utara di Medan.

c. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah Kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada.

Selain itu, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katolik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katolik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.



Sumber : [harnyrahayuning.blogspot.com](http://harnyrahayuning.blogspot.com)  
Gambar 3.3 Universitas Katolik Atma Jaya

d. Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde baru

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa orde baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas

dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

Untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).



Sumber : soeharto.co

Gambar 3.4 Presiden Soeharto berkunjung ke SD Inpres

e. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi

Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UU 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 2 Tahun 1989, mendefinisikan ulang pengertian pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

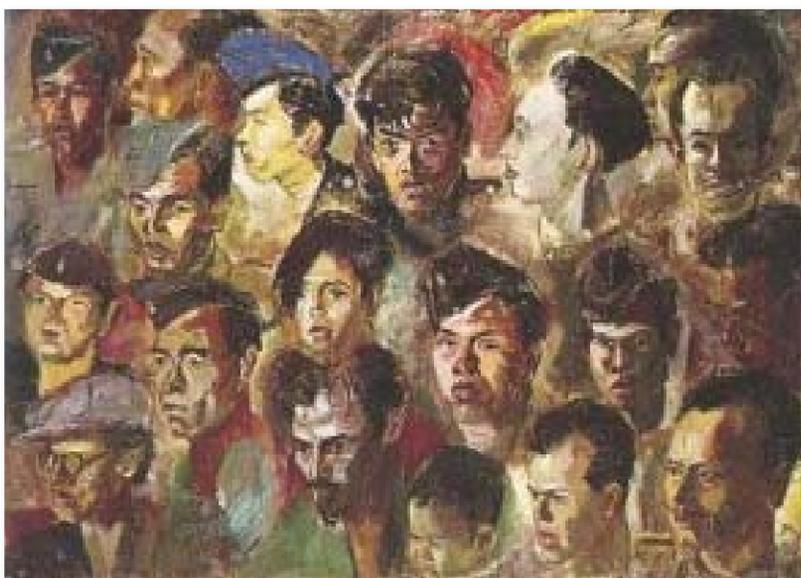
Pemerintah pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, sebagai berikut.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Pada pelaksanaan Kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
Kurikulum 2006	Secara umum, Kurikulum 2006 tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
Kurikulum 2013	Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, Keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran.

2. Dinamika Kebudayaan di Indonesia

Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan budaya yang menonjol adalah seni sastra dan lukis. Banyak sastrawan yang muncul saat itu, seperti Ismail Marzuki, C. Simanjuntak, Chairil Anwar, dan Idrus. Adapun Seniman lukis yang muncul adalah Basuki Abdullah, Affandi, dan Usman Ismail. Mereka muncul dengan karya-karya yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia serta kejayaan bangsa Indonesia di masa depan.



Sumber : <https://senirupasma.wordpress.com/>

Gambar 3.5 Lukisan Kawan-kawan Revolusi, karya Sindudarsono Sudjojono

Memasuki masa orde baru, pengembangan budaya dan seni diarahkan kepada usaha-usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, serta kesatuan nasional. Untuk itu, dilakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni secara luas yang melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula usaha pengamanan seni yang bertujuan menjamin dan meneruskan warisan budaya dan seni. Usaha itu antara lain mencakup usaha inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. Dalam rangka pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, dilakukan rehabilitasi dan perluasan museum.

Pada masa Reformasi, usaha pelestarian budaya Indonesia terus dilakukan, diantaranya dengan mendaftarkan budaya-budaya asli Indonesia ke UNESCO agar tidak diklaim oleh pihak-pihak lain.

Budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri. Hewan cenderung bersifat statis (menetap), sedangkan manusia selalu berubah (dinamis).

Sebagai contoh, anda dapat membedakan rumah burung dan rumah manusia. Dimanapun, burung pipit akan membuat sarang yang bentuknya sama. Bandingkan dengan rumah manusia di berbagai daerah di Indonesia.

Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. Sebagai Daya Tarik Bangsa Asing  
Seni budaya yang indah akan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Hal ini akan memberikan berbagai dampak positif, terutama bidang ekonomi.



Sumber : <https://whatamiwithoutyou.wordpress.com>

Gambar 3.6 Pertunjukan seni kolosal Ramayana

- b. Mengembangkan Kebudayaan Nasional  
Bangsa Indonesia memiliki ribuan macam budaya yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Untuk menjaga dan melestarikan, maka kita perlu mengembangkan dengan berbagai cara.



Sumber : <http://www.mitrapol.com>

Gambar 3.7 Galeri Batik

c. Tertanamnya Sikap Toleransi

Indahnya pelangi bukan karena kesamaan warna, melainkan warna-warni yang beraneka ragam itulah yang membuat pelangi menjadi menarik untuk dipandang. Demikiaikap toleransi dan saling menghargai akan mewadahi aneka ragam budaya sebagai warna-warni keindahan yang menawan.



Sumber : <http://www.satujam.com>

Gambar 3.7 Keberagaman Budaya Indonesia

d. Saling Melengkapi Hasil Budaya

Aneka budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, semuanya memiliki keunikan, kelebihan dan daya tarik masing-masing. Untuk semakin mengenalkan budaya nasional tersebut kepada lapisan masyarakat, agar kebudayaan nasional ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Sumber : <http://piko.aminus3.com>

Gambar 3.8 Festival Tari Nusantara 2011

## PENUGASAN 3.1

Anda diminta merancang, pendidikan mana yang akan ditempuh setelah peserta didik menamatkan pendidikan Paket B.

### Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan anda akan :

1. Mampu merencanakan sekolah apa yang akan ditempuh
2. Mampu mengaitkan hubungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan

### Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

### Langkah-langkah

Untuk mengerjakan penugasan ikutilah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tulislah beberapa sekolah yang akan ditempuh setelah menyelesaikan sekolah paket tingkat B.
2. Tuliskan pekerjaan yang paling anda sukai sebanyak 5 pekerjaan, dimulai dari yang paling kamu sukai.
3. Pilih pekerjaan yang paling anda sukai atau yg berada di no urut 1 dan sesuaikan dengan sekolah lanjutan anda.

## PENUGASAN 3.2

- ▶ Anda diminta mengidentifikasi budaya yang ada di wilayah masing-masing serta manfaat apa dari adanya budaya tersebut.
- ▶ Anda diminta menulis pengaruh tingkat Pendidikan pada suatu wilayah terhadap eksistensi dari suatu budaya

### Tujuan

Melalui penugasan ini diharapkan anda akan :

1. mengetahui macam-macam budaya yang ada di wilayah sekitar Anda
2. menganalisis pengaruh Pendidikan pada suatu wilayah terhadap eksistensi dari suatu budaya.

## Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

Buku catatan, pensil, pulpen, dan penggaris.

## Langkah- langkah

1. Tulislah 5 macam budaya yang ada di lingkungan anda.
2. Dari 5 macam budaya diatas tulislah manfaat budaya tersebut bagi kehidupan lingkungan sekitar.
3. Analisis lah pengaruh tingkat Pendidikan pada suatu wilayah terhadap eksistensi suatu budaya.

Jenis Budaya dan Manfaatnya bagi Masyarakat  
Desa/Kecamatan/Kabupaten ...

NO	JENIS BUDAYA	MANFAAT
1		
2		
3		
4		
5.		



## Latihan Unit 3

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar !

1. Menteri Pendidikan setelah proklamasi kemerdekaan adalah ...
  - a. Ki Hajar Dewantara
  - b. Mohammad Syafei
  - c. Mr. Suwandi
  - d. Mr. T.S.G Mulia
2. Tujuan dari dibentuknya panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia pada masa jabatan Mr. Suwandi adalah ...
  - a. untuk kebaikan Pendidikan Indonesia
  - b. untuk kemajuan Pendidikan Indonesia
  - c. untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran
  - d. untuk meneliti dan mendidik tenaga pengajar
3. Tujuan Pendidikan pada masa awal kemerdekaan adalah ...
  - a. mencerdaskan kehidupan masyarakat
  - b. mencerdaskan kehidupan bangsa
  - c. melatih agar tidak terjajah lagi
  - d. penanaman semangat patriotisme

4. Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta merupakan daerah pertama yang mempunyai Pendidikan ...
  - a. rendah
  - b. menengah pertama
  - c. menengah atas
  - d. tinggi
5. Pada akhir tahun 1949 sekolah rendah di Indonesia sudah mencapai ...
  - a. 23.775 sekolah
  - b. 24.775 sekolah
  - c. 25.775 sekolah
  - d. 26. 775 sekolah
6. Salah satu universitas yang didirikan pada masa Demokrasi liberal adalah ...
  - a. Universitas Padjajaran di Bandung
  - b. Universitas Gajah Mada di Yogyakarta
  - c. Universitas Airlangga di Surabaya
  - d. Universitas Brawijaya di Malang
7. Pemberantasan buta huruf pada pemerintahan Orde baru dimulai pada tanggal ...
  - a. 16 Agustus 1978
  - b. 2 Mei 1984
  - c. 17 Agustus 1945
  - d. 2 Mei 1959
8. Kurikulum pertama pada masa Reformasi adalah ...
  - a. kurikulum 2013
  - b. kurikulum 2006
  - c. kurikulum KBK
  - d. kurikulum satuan pendidikan
9. Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi tugas guru adalah ...
  - a. Menjelaskan materi dengan rinci
  - b. Menjawab semua latihan soal yg ada di buku
  - c. Menemani siswa ketika dikelas
  - d. Sebagai fasilitator
10. Perbedaan mendasar antara KBK dengan Kurikulum 2006 adalah ...
  - a. Menekankan keaktifan siswa
  - b. Pengembangan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah
  - c. Menekankan keaktifisan guru
  - d. Pengembangan silabus dan penilaian ditentukan dari pusat
11. Setelah proklamasi kemerdekaan perkembangan budaya yang paling menonjol adalah ...
  - a. seni sastra dan lukis
  - b. seni lukis dan seni tari
  - c. seni tari dan seni sastra
  - d. seni lukis dan seni sastra
12. Sastrawan yang muncul setelah proklamasi kemerdekaan adalah ...
  - a. Basuki Abdullah
  - b. Affandi
  - c. Usman Ismail
  - d. Chairil Anwar

13. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali . . .
  - a. potensi dalam bidang pariwisata
  - b. objek kajian budaya internasional
  - c. kegagalan komunikasi bahasa
  - d. adanya warisan kearifan lokal yang kaya
14. Yang bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah sekitar adalah . . .
  - a. mendokumentasikan pagelaran budaya daerah
  - b. mempelajari tarian adat daerah
  - c. mempelajari lagu daerah
  - d. mempelajari seni bela diri karate
15. Tari-tarian daerah pada saat ini banyak digunakan untuk acara . . .
 

a. keagamaan	c. penyambutan tamu
b. sesaji	d. syukuran

**Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!**

1. Sebutkan kurikulum yang diterapkan di masa Reformasi!
2. Menurut anda bagaimana perkembangan Pendidikan di Indonesia sampai saat ini?
3. Sebutkan jenis budaya yang ada di daerah Anda!
4. Jelaskan pengaruh budaya didaerah anda bagi kehidupan masyarakat!
5. Menurut anda seberapa penting Pendidikan bagi kehidupan masyarakat di sekitar Anda?



## Rangkuman

1. Politik pada awal kemerdekaan masih belum tertata dengan baik dan belum stabil. Hal ini dikarenakan masih ada system-sistem politik yang diterapkan di Indonesia masih menggunakan system politik Belanda.
2. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Presiden Soekarno mengambil keputusan dan merubah menjadi demokrasi terpimpin. Namun hal tersebut belum cukup mengatasi masalah politik di Indonesia sehingga muncul banyak pemberontakan di daerah.
3. Sehingga kemudian keadaan politik dapat terkendali Ketika memasuki masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto memimpin Indonesia sangat lama yakni 32 tahun sehingga muncul petisi untuk dilaksanakannya reformasi.

4. Reformasi telah dilaksanakan, dan sekarang keadaan politik cenderung stabil. Pemilihan presiden dilaksanakan 5 tahun sekali dan maksimal hanya dapat memimpin 2 periode.
5. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Misalnya, inflasi yang terlalu tinggi dan blockade laut yang dilakukan Belanda.
6. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), deficit keuangan, serta upaya mengubah struktur ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional tersendat-sendat.
7. Pada masa Orde baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini berhasil dilakukan salah satunya karena didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara.
8. Pada masa reformasi, Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Upaya mengatasi krisis yang dilakukan pada beberapa periode pemerintahan di masa Reformasi berhasil membuat ekonomi Indonesia menjadi kembali stabil.
9. Upaya pengembangan pendidikan di Indonesia sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini (masa Reformasi). Usaha-usaha tersebut antara lain sebagai berikut :
  - a. Pendirian universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang ada untuk memberikankesempatan anak didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
  - b. Dimunculkannya sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan.
  - c. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan perubahan kurikulum.
10. Dalam rangka melestarikan budaya nasional Indonesia, pemerintah melakukan usaha pengamanan budaya dan seni melalui inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, serta mendaftarkan budaya nasional Indonesia ke UNESCO.



## Kunci Jawaban, Pembahasan, dan Rubrik Penilaian

### Latihan Soal Unit 1

Pilihan Ganda

Skor 1 untuk setiap jawaban benar, maka skor maksimal 1. Berikut pembahasan dan kriteria penilaian untuk latihan soal pilihan ganda.

NO	PEMBAHASAN	SKOR MAKSIMAL
1	Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia belum mempunyai kepala pemerintahan. Ir, Soekarno Soekarno ketika membacakan teks proklamasi menjabat sebagai ketua PPKI. Pemilihan presiden dan wakil presiden setelah pengesahan UUD 1945. Jawaban : B	1
2	Hasil siding PPKI I 18 Agustus 1945 a. Mengesahkan UUD 1945 b. Memilih presiden dan wakil presiden c. Sebelum MPR terbentuk, tugas presiden dibantu oleh komite nasional Jawaban : C	1
3	Tugas KNIP a. Membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. b. Membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Jawaban : D	1
4	Partai-partai pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk memikirkan kepentingan partainya daripada kepentingan negara Jawaban : D	1
5	Pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum yang pertama yang bertujuan untuk memilih anggota DPR Jawaban : B	1
6	Prestasi gemilang cabinet Ali Sastro Amidjojo I berhasil melaksanakan konferensi Asia-Afrika Jawaban : B	1
7	Tiga partai besar mendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo II, PNI, Masyumi dan NU Jawaban : A	1

8	Pelanggaran pada demokrasi teroimoin adalah pengangkatan presiden seumur hidup Jawaban : D	1
9	Penyederhanaan partai politik agar tercipta stabilitas kehidupan bangsa Jawaban : B	1
10	Peran ganda ABRI (Dwifungsi ABRI) Jawaban : A	1
<b>TOTAL SKOR</b>		10

Uraian

Untuk soal isian, setiap jawaban diberikan skor maksimal 3. Kriteria yang diberikan adalah lengkap, cukup lengkap dan kurang lengkap.

NO	JAWABAN	LENGKAP 3	CUKUP LENGKAP 2	KURANG LENGKAP 1	SKOR MAKSIMAL
1	tujuan gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan bidang politik, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.				3
2	pemilihan umum secara langsung adalah proses pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang dilakukan oleh rakyat.				3
3	Penilaian Tutor				3
4	Penilaian Tutor				3
5	Penilaian Tutor				3
<b>TOTAL SKOR</b>					15

Nilai latihan soal Anda =  $\frac{\text{Perolehan skor pilihan ganda} + \text{skor uraian}}{25} \times 100$

25

### Latihan Soal Unit 2

Pilihan Ganda

Skor 1 untuk setiap jawaban benar, jika jawaban salah maka skornya 0. Berikut pembahasan dan kriteria penilaian untuk latihan soal pilihan ganda.

NO	PEMBAHASAN	SKOR MAKSIMAL
1	<i>Inflasi</i> adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Inflasi pernah terjadi pada awal kemerdekaan yang disebabkan oleh beredarnya mata uang jepang yang tidak terkendali Jawaban : B	1
2	Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah untuk dipinjam oleh pemerintah yang lebih dikenal dengan Pinjaman Nasional pegadaian. Jawaban :B	1
3	Tujuan dari Blokade laut yang dilakukan Belanda untuk menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia Jawaban :A	1
4	India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomatic dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. Jawaban : D	1
5	setelah kemerdekaan, pemerintah RI untuk sementara waktu mengakui mata uangpemerintahan Hindia Belanda, uang pemerintahan pendudukan Jepang, dan uang De Javasche Bank Jawaban :D	1
6	Pemerintah Orde baru mengeluarkan program untuk perbaikan perekonomian Indonesia yaitu program jangka pendek dan jangka Panjang. Program jangka pendek menitikberatkan pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program jangka Panjang lebih dikenal dengan Pelita (pembangunan lima tahunan) I sampai Pelita V Jawaban :A	1
7	Program jangka panjam dilaksanakan selama 25 tahun Jawaban :D	1
8	Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974) Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994) Jawaban :A	1
9	Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Jawaban :C	1

10	Bantuan Langsung Tunai adalah program pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jawaban : A	1
TOTAL SKOR		10

### Uraian

Untuk soal isian, setiap jawaban diberikan skor maksimal 3. Kriteria yang diberikan adalah lengkap, cukup lengkap dan kurang lengkap.

NO	JAWABAN	LENGKAP 3	CUKUP LENGKAP 2	KURANG LENGKAP 1	SKOR MAKSIMAL
1	barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan.				3
2	a. Melaksanakan program pinjaman Nasional b. Mengadakan diplomasi ke India c. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri				3
3	Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi bias tercapai				3
4	Penilaian Guru/Tutor				3
5	Penilaian Guru/Tutor				3
TOTAL SKOR					15

$$\text{Nilai latihan soal Anda} = \frac{(\text{Skor pilihan ganda} + \text{skor uraian})}{25} \times 100$$

### Latihan Soal Unit 3

#### Pilihan Ganda

Skor 1 untuk setiap jawaban benar, jika jawaban salah maka skornya 0. Berikut pembahasan dan kriteria penilaian untuk latihan soal pilihant ganda.

NO	PEMBAHASAN	SKOR MAKSIMAL
1	Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pertama setelah proklamasi kemerdekaan Jawaban : A	1
2	Mr. Suwandi membentuk panitia penyelidik penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertujuan untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran Jawaban : C	1
3	Penanaman semangat patriotisme merupakan tujuan Pendidikan pada awal kemerdekaan Jawaban : D	1
4	Pendidikan tinggi pertama berada di Jakarta, solo, Klaten, dan yogyakarta Jawaban : D	1
5	Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Jawaban : B	1
6	Pada masa Demokrasi Liberal didirikan beberapa universitas baru diantaranya adalah Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan. Jawaban : A	1
7	Pemberantasan buta huruf dimulai 16 Agustus 1978 Jawaban : A	1
8	Kurikulum pada masa Reformasi KBK, Kurikulum 2006 dan K13 Jawaban : C	1
9	Tugas guru sebagai fasilitator Jawaban : D	1
10	Jawaban : B	1
11	Setelah kemerdekaan perkembangan seni sastra dan seni lukis sangat menonjol Jawaban : A	1
12	Banyak sastrawan yang muncul setelah kemerdekaan, seperti Ismail Marzuki, C. Simacjuntak, Chairil Anwar, dan Idrus. Jawaban :D	1
13	Dampak positif budaya Indonesia : a. potensi dalam bidang pariwisata b. objek kajian budaya internasional c. adanya warisan kearifan lokal yang kaya Jawaban :C	1

14	Cara melestarikan budaya daerah : a. mendokumentasikan pagelaran budaya daerah b. mempelajari tarian adat daerah c. mempelajari lagu daerah Jawaban : D	1
15	Tarian daerah saat ini banyak digunakan untuk penyambutan tamu Jawaban :C	1

### Uraian

Untuk soal isian, setiap jawaban diberikan skor maksimal 3. Kriteria yang diberikan adalah lengkap, cukup lengkap dan kurang lengkap.

NO	JAWABAN	LENGKAP 3	CUKUP LENGKAP 2	KURANG LENGKAP 1	SKOR MAKSIMAL
1	KBK, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013				3
2	Penilaian Tutor				3
3	Penilaian Tutor				3
4	Penilaian Tutor				3
5	Penilaian Tutor				3
TOTAL SKOR					15

$$\text{Nilai latihan soal Anda} = \frac{(\text{Skor pilihan ganda} + \text{skor uraian}) \times 100}{30}$$



## Kriteria Pindah Modul

Setelah Anda mengerjakan soal latihan, selanjutnya cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia, atau bahas bersama tutor. Lakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hitung jumlah skor pada setiap latihan unit
2. Jumlahkan skor yang diperoleh setiap latihan unit

Untuk mengetahui ketuntasan belajar anda hitunglah tingkat penguasaan materi anda dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai ketuntasan} = \frac{\text{Jumlah skor latihan unit } 1 + 2 + 3}{3} \times 100$$

Batas ketuntasan minimal adalah 75%. Jika pencapaian ketuntasan Anda 75% ke atas, maka Anda dinyatakan **TUNTAS**. Lanjutkan untuk mempelajari modul berikutnya.

Sebaliknya, jika pencapaian ketuntasan Anda kurang dari 75%, maka Anda dinyatakan **BELUM TUNTAS**. Ulangi untuk mempelajari modul, terutama pada unit yang memperoleh nilai belum tuntas dan ulangi mengerjakan latihan soal, terutama yang Anda jawab **belum betul** sampai Anda mampu menjawabnya dengan **betul**.

Jika pengulangan Anda telah mencapai batas minimal ketuntasan, silahkan untuk melanjutkan mempelajari modul berikutnya.

## Saran Referensi

Ahmad Muslih, Iwan Setiawan, Dewi Pusparatri.2015. *Ilmu Pengetahuan Sosial: Untuk SMP/MTs Kelas IX*.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia.2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka

## Daftar Pustaka

Ahmad Muslih, Iwan Setiawan, Dewi Pusparatri.2015. *Ilmu Pengetahuan Sosial: untuk SMP/MTs Kelas IX*.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IX untuk SMP/MTs, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Moejanto.1993. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 dan 2*. Yogyakarta: Kanisius

Poepongoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosoesanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia.2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka

<https://www.muttaqin.id/2016/08/soal-sejarah-perkembangan-politik-dan-ekonomi-awal-ke-merdekaan-1.html>diakses tanggal 3 Juni 2018

[http://umar-danny.blogspot.com/2017/06/ccontoh-soal-pg-dan-jawaban-sejarah\\_18.html](http://umar-danny.blogspot.com/2017/06/ccontoh-soal-pg-dan-jawaban-sejarah_18.html) diakses tanggal 3 Juni 2018

<https://biologigonz.blogspot.com/2011/02/demografi-kependudukan-9.html>diakses tanggal 3 Juni 2018

<http://www.rajacourse.com/soal-geografi-kelas-9-smp/>diakses tanggal 3 Juni 2018

## Profil Penulis

Nama	: Onny Budi Antika, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 12 Juni 1991
Pangkat/Golongan	: -
Jabatan Fungsional	: -
Unit Kerja	: PKBM Kak Seto Surabaya
Alamat Kantor	: Jl. Sidosermo Airdas Kav. A-7, Surabaya
Telepon	: 031-8473116
Email	: <a href="mailto:onnybudi@gmail.com">onnybudi@gmail.com</a>
Handphone	: 083830266168
Pendidikan	: Sarjana (S1)
Bidang studi	: Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya
Pengalaman Menulis	: 1. Modul Pendidikan Kesetaraan Mapel Ilmu Pengetahuan Sosial Paket B / Setara SMP Kelas VII 2. Modul Pendidikan Kesetaraan Mapel Ilmu Pengetahuan Sosial Paket B / Setara SMP Kelas VIII



**Catatan :**